

**IMPELEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 37 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK EFISIENSI BIAYA
PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI
SMP NEGERI 3 SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

OLEH:

RISKA YULIANTI

NPM: 1303100175

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : RISK A YULIANTI
N P M : 1303100175
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NO. 37 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN
2011 UNTUK EFISIENSI BIAYA PENDIDIKAN WAJIB
BELAJAR 9 TAHUN DI SMP NEGERI 3 SIMEULEU TIMUR
KABUPATEN SIMEULEU

Medan, 28 Oktober 2018

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. R. KUSNADI, M.AP.

NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd.

DISETUJUI OLEH :

KETUA JURUSAN,

NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN.

Dr. ARFIN SALEH, S.Sos., M.Sp.

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : RISKA YULIANTI
N P M : 1303100175
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari, tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2018
Waktu : 08.30 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. MOH. YUSRI, M.Si (.....)
PENGUJI II : Drs. R. KUSNADI, M.AP. (.....)
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Sp. (.....)
PENGUJI IV : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd. (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Sp.


Drs. ZUL FAHMI IBNU, M.I Kom



RISKA YULIANTI

PERNYATAAN

ABSTRAK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya, RISKA YULIANTI NPM: 1303100175 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian saya di batalkan .
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, September 2018

Yang menyatakan,



RISKA YULIANTI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK EFISIENSI BIAYA PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI SMP NEGERI 3 SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE

RISKA YULIANTI
NPM: 1303100175

Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 memberi petunjuk secara teknik bahwa penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2011 ditujukan sebagai stimulus bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan/implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 untuk Efisiensi Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 3 Simeulue Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 dalam upaya Efisiensi Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 3 Simeulue Kabupaten Simeulue sudah cukup baik, hal ini di buktikan dari tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), adanya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan dana Bantuan operasional sekolah (BOS), adanya anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM), dan adanya strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat :

1. Terimakasih kepada keluarga penulis khususnya yang paling utama kepada ibu saya Haridam yang sangat saya sayangi dan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada terhingga dan dukungan moril maupun matril kepada penulis. Serta kepada Abang dan adik saya Jufariadi, Ariadi saputra, dan Fahreza yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada saya.

2. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, M.Pd, selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan sebagai Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini..
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Drs. R. Kusnadi, M.AP, selaku dosen Pembimbing I pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan segenap Staff/Pegawai Biro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata-1. Permohonan maaf tentunya penulis khaturkan kepada segenap Visitas Akademika FISIP UMSU atas kekurangan yang ada pada diri penulis.

Begitu pula kepada segenap rekan-rekan seangkatan stambuk 2014 di manapun Anda berada baik yang telah mendukung, mendoakan agar skripsi ini segera terwujud, Jika penulis banyak melakukan kesalahan, dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis minta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang di dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan, Agustus 2018

Penulis

RISKA YULIANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	7
1. Pengertian Implementasi	7
2. Pengertian Kebijakan	9
3. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
4. Pengertian Implementasi Kebijakan	11
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	14
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan.....	15
B. Konsepsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16
1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17
3. Waktu Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17
C. Konsep Efisiensi dan Pendidikan	18
1. Pengertian Efisiensi	18
2. Pengertian Pendidikan	19
3. Sarana dan Prasarana Pendidikan	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Kerangka Konsep.....	24
C. Definisi Konsep	25
D. Kategorisasi	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Narasumber	27
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	28
1. Gambaran umum SMP Negeri 3 Simeulue Timur.....	28
2. Struktur Organisasi SMP Negeri 3	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Deskripsi Data Narasumber	41
2. Deskripsi Data Hasil Wawancara	43

B. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Keadaan Fasilitas Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Sileulue Provinsi Aceh	34
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal Pada SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Aceh	41
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan Non Formal Pada SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.....	42
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia/Umur Pada SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh	42
Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin Pada SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Salah satu program pemerintah di bidang pendidikan dasar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu, meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 memberi petunjuk secara teknik bahwa penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2011 ditujukan sebagai stimulus bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dan pengalokasi dana BOS tersebut per-Sekolah Negeri dan pengalokasian dana BOS untuk sekolah Swasta per-kabupaten/kota yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Penggunaan dana BOS untuk mekanisme pembelian barang dan jasa atau sarana dan prasarana meliputi: biaya non personalia seperti biaya bahan atau

peralatan pendidikan, biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi. Biaya kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yaitu biaya pendaftaran, formulir, administrasi pendaftaran, serta pembuatan spanduk juga termasuk biaya tak terduga yang meliputi sarana dan prasarana sekolah. Dana BOS juga digunakan untuk pembiayaan yang meliputi kegiatan ekstrakurikuler siswa yaitu biaya kegiatan remedial, penetapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, PMR dan UKS. Biaya yang dikeluarkan dari dana BOS hanya berupa dana bantuan transportasi dan akomodasi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, pembelian alat olahraga, alat-alat kesenian dan biaya perlengkapan ekstrakurikuler lainnya seperti biaya pendaftaran mengikuti lomba.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa dana BOS memiliki aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar, seperti pelanggaran terhadap dana yang disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan, dipinjamkan pihak lain, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, membiayai iuran pemerintah, insentif untuk guru, digunakan untuk rehabilitasi, membangun gedung atau ruang baru, menanamkan saham, membiayai biaya yang sudah dibiayai pemerintah pusat atau daerah dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan sekolah.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa pelaksanaan/implementasi kebijakan dana BOS di sekolah SMPN 3 Simeulue Timur belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010. Seperti halnya dalam biaya pembelajaran terutama dalam hal pengadaan

buku panduan di SMP N 3 Simeulue Timur hanya beberapa buku “tipis” lembar kerja siswa dan buku cetak hanya beberapa mata pelajaran saja. Kemudian dibidang sarana dan prasarana di SMPN 3 Simeuleu Timur tidak mendapat bantuan apa pun segala hal bersifat tak terduga seperti pengadaan spidol, papan tulis, pengecatan dinding menggunakan dana pribadi sekolah dan untuk kegiatan ekstrakurikuler SMPN 3 Simeulue Timur hanya mampu mengadakan ekstrakurikuler pramuka saja dengan alasan jumlah subsidi yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan mestinya. Dilain pihak adanya ketidak percayaan masyarakat/orang tua kepada pemerintah karena adanya pungutan-pungutan liar. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam pengimplementasikan kebijakan dana BOS sebagaimana mestinya, sehingga hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat mterhadap kebijakan dana BOS itu sendiri. Dengan kata lain bahwa dana BOS yang disalurkan tidak dilaksanakan seefisien mungkin dan pelaksanaan kebijakan program pembangunan pendidikan sampai saat ini belum memenuhi harapan, seperti tingginya angka putus sekolah di kabupaten Simeulue.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tentang pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan dana BOS di SMPN 3 Simeuleu Timur dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 untuk Efisiensi Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 untuk Efisiensi Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan/implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 untuk Efisiensi Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 3 Simeulue Kabupaten Simeulue.”

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah;

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan pikiran secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungan pemerintahan;
- b. Memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan di samping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai

referensi dalam penelitian selanjutnya, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengimplementasi kebijakan pemerintah.

D. Sistematika Penulisan

BAB I :Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Uraian teoritis, terdiri dari: pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik, pengertian dana BOS, tujuan BOS, sasaran program dan besar satuan dana BOS, waktu penyaluran dana BOS, pengertian efisiensi, pendidikan.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, narasumber/key informan, lokasi penelitian.dan waktu penelitian, serta deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : Hasil peneltian dan Pembahasan berisikan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan hasil wawancara yang selanjutnya dibahas/dianalisis sehingga penelitian dapat memberikan interprestasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang telah dibahas, juga dalam bab ini disampaikan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam penelitian karena dengan unsur ilmu inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat penelitiannya. Seperti dikemukakan Soeharno (2010:28) bahwa suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Berdasarkan hal tersebut dan didasarkan pada objek penelitian yang akan diteliti maka uraian teoritis yang penulis himpun adalah sebagai berikut:

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksana atau penerapan. Dunn (2003:132) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilalkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutkannya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan publik.

Susilo (2007:174) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi adalah aktifitas-aktifitas

yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan ini adalah suatu aspek proses kebijakan, yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

Patton dan Sawichi dalam Tangklisan (2003:29) bahwa “implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program kerja adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain: 1). Adanya tujuan yang ingin dicapai, 2). Prosedur yang harus dilalui, 3). Adanya anggaran yang dibutuhkan, 4). Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat dari program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dilaksanakan.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya, implementasi memiliki arti penting baik di dalam organisasi maupun perorangan karena implementasi bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi,

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah serta mengatasi masalah tersebut.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan. Menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus menjadi pertimbangan holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan

yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Menurut Friedrich dalam Sholly (2007:09) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan mencakup dua aspek, yaitu kebijakan nasional yang merupakan kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan Nasional/Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar, dan kebijakan umum yang merupakan kebijakan Presiden (tingkat pusat) dan kebijakan pemerintah daerah (ditingkat daerah).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Didalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan itu semua tergantung pada manfaat dan kerugian.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Inu Kencana (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan,

mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Menurut Lubis (2007:09) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Menurut Islamy (2003:191) bahwa kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

Menurut Abidin (2006:22) bahwa kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Chief dalam Islamy (2003:05) mendefinisikan kebijakan negara sebagai *“an sanctioned course of action addresses to a particular problem or group of related problems that society at large”*. yaitu suatu tindakan yang bersanksi mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Menurut Budiman (2013:9) kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorangan atau golongan dan kelompok.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

4. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal undang-undang legislatif, pengeluaran peraturan eksekutif, pelolosan pengadilan atau keluarnya standar pengaturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Menurut Islamy (2003:102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (*out put*) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan tampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Dwijowinoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik ekonomi sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Menurut George Edward III dalam Tangklisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi (*communication*). Persyaratan pertama dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan, jadi ada kejelasan tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, artinya tidak ada pertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Sukses tidaknya pelaksanaan dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimana penranmisian tugas atau fungsi tertentu yang akan dilakukan; 2) Sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya adalah berupa SDM atau meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik dan informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas di dalam suatu menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya. Staf tersebut haruslah memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik

dalam tugas tersebut. informasi menyangkut bagaimana melaksanakan suatu hal dan data ketaatan dari personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah; 3) Kecenderungan-kecenderungan (*disposition*). Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka terhadap kebijaksanaan dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini juga menyangkut cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijaksanaan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah serta mengatasi masalah.

5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan out put dan outcomes seperti direncanakan.

Menurut Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro. Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro.

Menurut Mustopadidjaja (2002: 112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : a) komunikasi, agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu

keputusan mesti tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti di transmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus di kerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi. Para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus di kerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar dan fragmentasi.

B. Konsepsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, bahwa standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia adalah standar 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan,

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMT (terbuka). Negeri terhadap biaya operasi sekolah, bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan tidak boleh berlebihan.
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam

bentuk apa pun, baik di sekolah negeri maupun swasta.

- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swasta.

3. Waktu Penyaluran Dana BOS

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 bahwa Tahun Anggaran 2010, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari dan Desember 2010, yaitu semester 1 tahun pelajaran 2010/2011. Penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan dibulan pertama setiap triwulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat bulan Februari.

C. Konsep Efisiensi dan Pendidikan

1. Pengertian Efisiensi

Miranda (2003) menyatakan bahwa efisiensi adalah prediksi pengeluaran/out put pada biaya minum, atau merupakan rasio antara kuantitas sumber yang digunakan dengan keluaran yang dikirim. Efisiensi adalah suatu pengertian terhadap suatu keadaan, sehingga cara penilaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu sambil lalu saja, melainkan harus dalam waktu cukup dan dilakukan dengan penelitian.

Menurut Drucker dalam Amirullah (2004:8), efisiensi adalah mengerjakan suatu dengan benar. Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak pemborosan.

Menurut Sedarmayanti (2001:112) efisiensi merupakan pelaksanaan cara-cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara termudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam waktunya, teringan dalam bebannya dan terpendek dengan jaraknya.

Menurut Moenir (2002:40) bahwa efisiensi adalah suatu pengertian terhadap suatu keadaan, sehingga cara penilaiannya tidak dapat dilakukan sambil lalu saja, melainkan harus dalam waktu cukup dan dilakukan dengan penelitian.

Dari uraian dan penjelasan di atas, maka dapat dilihat pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan suatu program. Efisiensi dapat membantu terlaksananya suatu kegiatan, pembangunan serta pencapaian tujuan suatu organisasi sehingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan dengan melewati proses yang dapat dipertanggung jawaban. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (out put), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

Dari pendapat para ahli di atas Penulis sependapat dengan Drucker dalam Amirullah bahwa efisiensi mengerjakan sesuatu dengan benar. Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kata yang sangat sering kita dengar dari masa kita mengalami masa kecil sampai saat kita hidup pada usia berapa pun. Pendidikan menjadi suatu kata yang paling mudah kita gunakan ketika dikaitkan dengan sesuatu bangunan yang bernama 'sekolah'. Dari sini mulai muncul suatu konsepsi sempit mengenai arti pendidikan. Pendidikan dikaitkan dengan 'lembaga' (baca: sekolah) maka pendidikan akan mengalami keterbatasan karena dianalogikan dengan permanen/non-permanen yang digunakan sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan usia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Notoatmodjo (2003 : 16), menjelaskan bahwa :Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2002:263) menjelaskan bahwa : Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan kewajiban yang harus kita kenyam semenjak dari lahir. Karena dari pendidikan itulah kita akan tahu banyak tentang wawasan di dunia dalam kehidupan ini.

Pendidikan merupakan usaha agar mengembangkan potensi dirinya dan juga merupakan faktor dasar dari kemajuan bangsa. Oleh karenanya sumber daya manusia sangat mutlak untuk di tingkatkan dalam menghadapi perkembangan kemajuan yang ada. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, usaha yang dapat dilakukan adalah melalui segi pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal serta pendidikan informal. Dalam kaitannya dengan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Pasal 26 dan 27 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan adanya beberapa pemahaman tentang Pendidikan Nonformal dan pendidikan Informal yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- 2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta sikap dan kepribadian profesional.
- 3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- 4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta pendidikan yang sejenis.
- 5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha agar mengembangkan potensi dirinya dan juga merupakan faktor dasar dari kemajuan bangsa.

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kebijakan pemerintah dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai, Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat, ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VII Standar Sarana dan

Prasarana, pasal 42 menegaskan bahwa:

- 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Winarta (2006:134) penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian dan menemukan pengertian pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif juga merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud penafsiran fenomena yang terjadi dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif menurut Moleong (2006:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Pada penelitian ini penulis mengadakan pendekatan yang diarahkan pada latar belakang dari individu secara keseluruhan dengan menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realitas sosial yang kompleks mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 untuk efisiensi biaya pendidikan wajib belajar 9 tahun di SMP N 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh

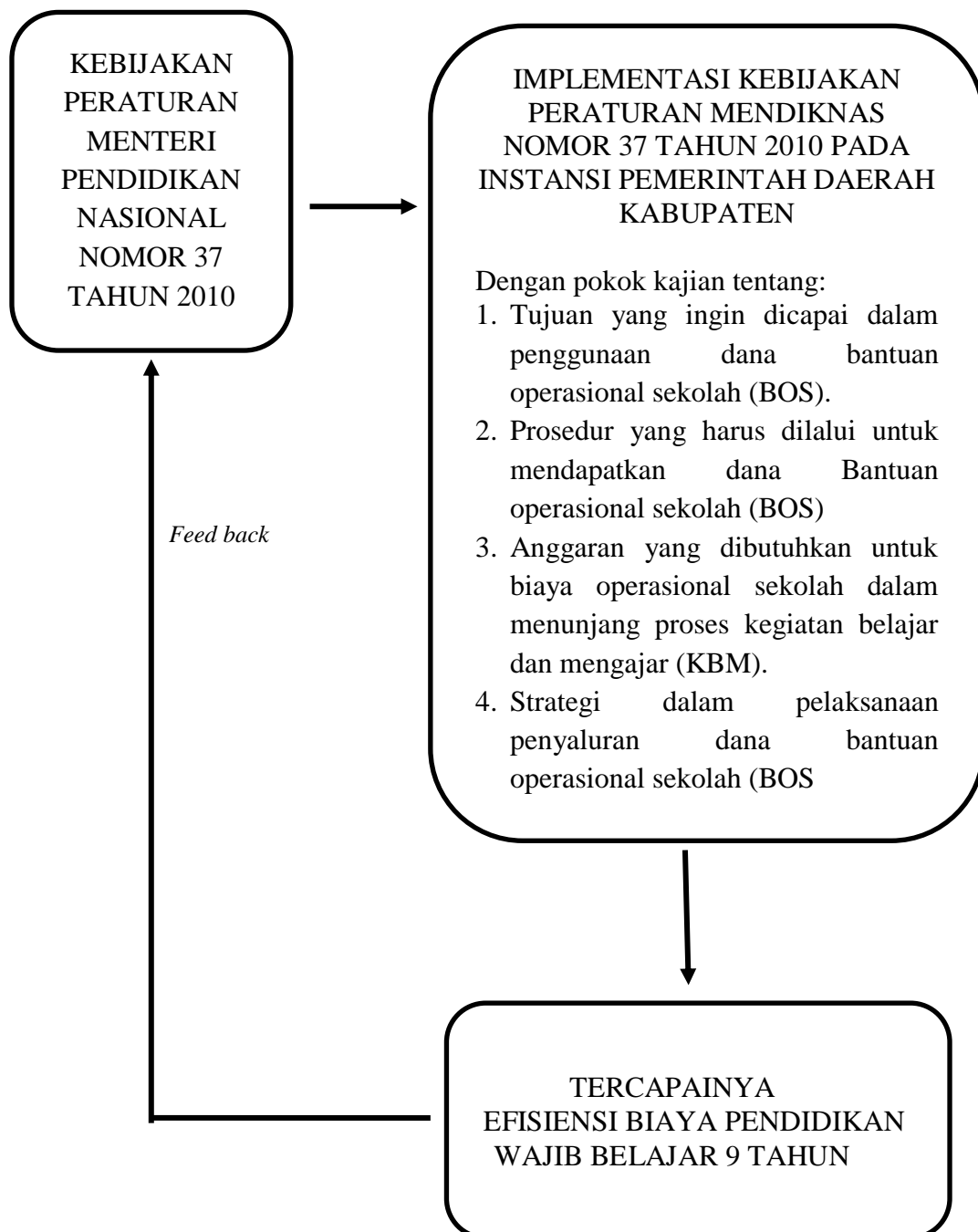
B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dalam pengembangan teori, maka

konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam sebuah model teoritis sebagai mana digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1.

KERANGKA KONSEP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)



C. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang dihadapi.
2. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat .
3. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.
4. Implementasi kebijakan sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
5. Implementasi Kebijakan Publik bila dilihat dari arti luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

6. Efisiensi adalah sesuatu yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan.
7. Pendidikan merupakan usaha agar mengembangkan potensi dirinya dan juga merupakan faktor dasar dari kemajuan bangsa.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi di dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
2. Adanya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan dana Bantuan operasional sekolah (BOS).
3. Adanya anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM).
4. Adanya strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti dan data yang diperoleh ini disebut dengan data primer.

Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan/narasumber.

2. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data relevan dengan permasalahan yang diteliti, dan diperoleh dari buku-buku referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

F. Teknik Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan pada saat wawancara adalah memperoleh data kualitatif melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai tujuan penelitian yang telah dirumuskan, data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

G. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber untuk memberikan pandangan terhadap implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 untuk efisiensi biaya pendidikan wajib belajar 9 tahun di SMPN 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue (Aceh).

. Adapun sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Ibu Ermi Sarina Dewi, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Simeulue Timur
2. Zainuddin HZ, S.Pd sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 3 Someulue Timur
3. Ibu Aniar sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Sekolah SMP Negeri 3 Simeulue Timur
4. Bapak Muhammad Deski sebagai Pengawas Sekolah SMP Negeri 3 Simeulue Timur
5. Bapak Asruzam sebagai Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 3 Simeulue Timur
6. Ibu Nesi Asrani sebagai Orang tua murid SMP Negeri 3 Simeulue Timur

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di SMPN 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue (Aceh). Dan waktu penelitian adalah dari bulan Mei sampai dengan bulan juli 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum SMP Negeri 3 Simeulue Timur,

Berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur pertama kali diawali dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang di kelola oleh yayasan Bapak Hamdi yang diawali penerimaan murid baru pada

tahun 1995/1996. Dengan bangunan swadya masyarakat, selanjutnya bapak Hamdi menyediakan 2 hektar tanah untuk lokasi pembangunan ruang kelas baru. Atas kerjasama tokoh pendiri dan pengurus yayasan bapak Hamdi diserahkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dan pada bulan April Tahun 2011 SMP tersebut menjadi sekolah menengah pertama negeri pada bulan April Tahun 2001 dengan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeuleu.

SMP Negeri 3 Simeulue Timur adalah sekolah menengah pertama yang telah menjadi sekolah negeri di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, berada kurang lebih 150 Km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini.

Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Si navang yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang. Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu. Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara Sibigo ibukota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co

karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu Rasak - sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati - yang dikirim ke Belanda via laut.

Karena posisi geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatera, hiruk-pikuk konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas di kawasan ini, bahkan tidak ada pergerakan GAM di kawasan kepulauan ini.

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakyat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakyat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia. Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasimi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan dia terhadap isi pernyataan Kongres Rakyat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, di mana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom. Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita

memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995.

Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue. Di mana pada saat itu, J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat fraksi yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan dia berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya. Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue. Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.

Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-Ambung. Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat selama ini telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom.

Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran di mana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita. Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

Hampir seluruh penduduk kepulauan ini beragama Islam. Penduduk kawasan ini juga berprofil seperti orang Cina, dengan kulit kuning dan sipit dan mempunyai bahasa yang berbeda dengan Aceh daratan.

Terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari yakni bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Bahasa Devayan umumnya digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam. Bahasa Sigulai umumnya digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat,

Alafan dan Salang. Sedangkan bahasa Leukon digunakan khususnya oleh penduduk Desa Langi dan Lafakha di Kecamatan Alafan. Selain itu digunakan juga bahasa pengantar (*lingua franca*) yang digunakan sebagai bahasa perantara sesama masyarakat yang berlainan bahasa di Simeulue yaitu bahasa Jamu atau Jamee (tamu), awalnya dibawa oleh para perantau niaga dari Minangkabau dan Mandailing.

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigjayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara.

Berdasarkan data, luas wilayah Kabupaten Simeulue yaitu 2.310 KM², terletak antara 02° 02' 03'' - 03° 02' 04'' Lintang Utara dan 95° 22' 15'' – 96° 42' 45'' Bujur Timur. Merupakan daerah kepulauan terdiri dari ± 57 buah pulau besar dan kecil, Panjang pulau Simeulue ± 100,2 Km dan lebar antara 8 – 28 Km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha.

Batasan wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah utara : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah timur : berbatasan dengan Samudera Hindia

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Cakupan wilayah Kabupaten Simeulue, memiliki 138 jumlah desa yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari : Simeulue Timur, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Tengah, Teupah Selatan, Teupah Barat, Salang, Alafan dan Teluk Dalam. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue sebanyak 88.963 jiwa (Sumber Disdukcapil data tahun 2012).

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya secara administratif dibantu oleh unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Urusan Tata Usaha. Dalam proses belajar dan mengajar secara operasional dilaksanakan oleh para tenaga pendidikan yang secara profesional berkapasitas sebagai Guru yang rata-rata berpendidikan Sarjana (S.1) Jumlah Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh seluruhnya berjumlah 21 orang.

Adapun ruang kelas yang merupakan fasilitas belajar yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

KEADAAN FASILITAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SILEULUE PROVINSI ACEH

No.	Ruang Kelas			Jenis Fasilitas sekolah					
	Baik	Rusak Ringan	Jumlah	Perpustakaan	Lapangan Olahraga	Lab. IPA	Toilet		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	7	4	11	1	1	1	2		

Sumber: SMP Negeri 3 Semeulue Timur tahun 2017

Adapun Tata Tertib Guru dan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan proses belajar dan mengajar di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Sileulue Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

a. Tertib Waktu :

- 1) Hadir di sekolah lebih dini (07.30 WIB)
- 2) Hadir tepat waktu (07.45 WIB)
- 3) Hadir Terlambat (> 08.00 WIB)
- 4) Masuk Kelas & memulai PBM (08.00 WIB)
- 5) Pulang (PBM berakhir) (14.00 Wib)
- 6) Tepat waktu istirahat, pergantian jam dan kembali masuk kelas pada pertemuan berikutnya.

b. Terlambat masuk dan atau mendahului pulang tanpa permisi/izin yang syah, dianggap absen, dan atau dapat dihitung secara komulatif, apabila telah

mencapai 6,15 (6 jam 15menit), dikonversi menjadi satu hari tidak masuk kerja (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010).

c. Tertib mengikuti kegiatan sekolah, antara lain :

- 1) Upacara bendera pada hari senin
- 2) Upacara hari Nasional dan Keagamaan
- 3) Kegiatan apel pagi setiap pagi
- 4) Kegiatan SKJ
- 5) Rapat- rapat staff dan guru
- 6) Kegiatan- kegiatan OSIS
- 7) Kegiatan Seni Budaya, dll.

d. Tertib Presentasi (Kehadiran)

- 1) Bagi guru CPNS/PNS dan tersertifikasi, wajib hadir/ bertugas 6 hari kerja dalam satu minggu dan demikian juga dengan pegawai administrasi tata usaha
- 2) Bagi guru GTT/Pegawai (honorer Komite) wajib masuk sesuai kesepakatan dengan pimpinan sekolah, berdasarkan tuntutan jumlah jam pelajaran dan kebutuhan.
- 3) Bagi guru/pegawai CPNS/PNS, wajib hadir (bertugas) diluar hari yang sudah ditetapkan, apabila menurut Pimpinan perlu/penting sesuai kebutuhan
- 4) Bagi guru/pegawai lainnya, untuk poin (3), diharapkan sama dengan CPNS dan PNS

e. Tertib informasi ketidak hadiran :

- 1) Setiap guru/pegawai yang berhalangan masuk, wajib membuat surat permissi kepada Pimpinan melalui piket harian
 - 2) Bagi guru/pegawai yang berhalangan disebabkan sakit tak bersahabat atau partus, wajib melampirkan bukti keterangan yang syah, sesuai dengan alasan.
 - 3) Bagi guru/pegawai yang berhalangan bertugas, wajib melimpahkan tugasnya kepada guru pengganti/piket dan menyerahkan RPP dan buku pedoman mengajarnya.
- f. Tertib melaksanakan PBM dan tugas administrasi sekolah :
- 1) Tiap guru wajib :
 - a) Membuat/memiliki RPP, dll, sewaktu mengajar di kelas
 - b) Menyajikan materi pelajaran yang bermutu dengan teratur, runtun dan tuntas .
 - c) Memasukkan muatan Pendidikan Karakter pada setiap RPP yang akan disajikan dalam kelas, waktu disesuaikan.
 - d) Memiliki metode dan strategi mengajar yang tepat dan variatif, bukan klasik atau monoton
 - e) Mengembangkan kompetensi profesi keguruan yang meliputi : Kompetensi Pedagogic, Kompetensi Sosial, Kompetensi Kepribadian, dan Kompetensi Keprofesionalan.
 - f) Mempelajari dan mengenal latar belakang kemampuan dan kepribadian peserta didik sebelum dan sewaktu PBM berlangsung.
 - g) Menguasai kelas selama PBM berlangsung

- h) Memperhatikan segenap tingkah laku siswa selama PBM berlangsung, termasuk siswa yang kelaur masuk kelas.
- i) Menciptakan komunikasi dua arah dalam kegiatan belajar
- j) Memberikan punishment secara manusiawi terhadap siswa yang nakal dan melanggar aturan
- k) Bertindak dan berperan sebagai morality deminder bukan penjajah mental.
- l) Berprilaku sebagai seorang guru yang maturity (memiliki kematangan pribadi dan mental) terhadap siswa.
- m) Melaksanakan evaluasi pada tiap akhir KD untuk mengetahui ketercapaian tiap indikator. (bila dipandang perlu mengadakan remedial dan pengayaan)
- n) Melakukan penilaian setiap ulangan, terst atau tugas yang diberikan dan menyampaikannya kepada siswa sebagai feed back, secara fair.
- o) Memiliki dan mengisi daftar nilai ulangan harian.
- p) Membuat laporan- laporan ketuntasan materi, ketuntasan belajar, dan mengukur persentase daya serap. (Daya serap perseorangan/ daya serap klasikal)
- q) Mengisi buku batasan pembelajaran setiap pertemuan (tatap muka)
- r) Membuat kisi- kisi soal sebelum pembuatan naskah soal ulangan umum.

- s) Menyelesaikan penetapan dan pengolahan nilai siswa pada tiap akhir umum dengan segera, untuk dituangkan dalam DKN dan Raport Siswa.
 - t) Tiap Pegawai wajib Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kegiatan administrasi yang meliputi : Adm. Umum, Adm. Kepegawaian, Adm. Pengajaran dan Evaluasi, Adm. Kesiswaan dan Adm. Keuangan, dengan efektif, efisien, dan penuh perhatian serta tanggung jawab tugas yang tinggi.
- h. Larangan bagi guru/pegawai :
- Setiap guru/pegawai dilarang untuk :
- 1) Melanggar, mengangangi, dan apabila melecehkan aturan dan tata tertib yang berlaku.
 - 2) Melakukan atau melaksanakan kebalikan dari seluruh poin pada butir (1) di atas.
 - 3) Mencaci, memaki, membentak dan atau mengancam dalam memberikan tindakan atau hukuman.
 - 4) Melemahkan mental siswa selama PBM berlangsung
 - 5) Mengajari, menyarankan dan atau menghasut siswa untuk berbuat disintegritas di dalam dan di laur lingkungan sekolah.

2. Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Simeulue Timur.

Struktur organisasi SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah

b. Wakil Kepala Sekolah

c. Kepala Urusan Tata Usaha;

Kepala Urusan Tata Usaha terdiri dari;

2) Bendahara Gaji & BOS

3) Statistik;

d. Urusan Perpustakaan

e. Urusan Kurikulum

f. Urusan Kesiswaan

g. Urusan Humas

h. Urusan Bimbingan Konseling (BK)

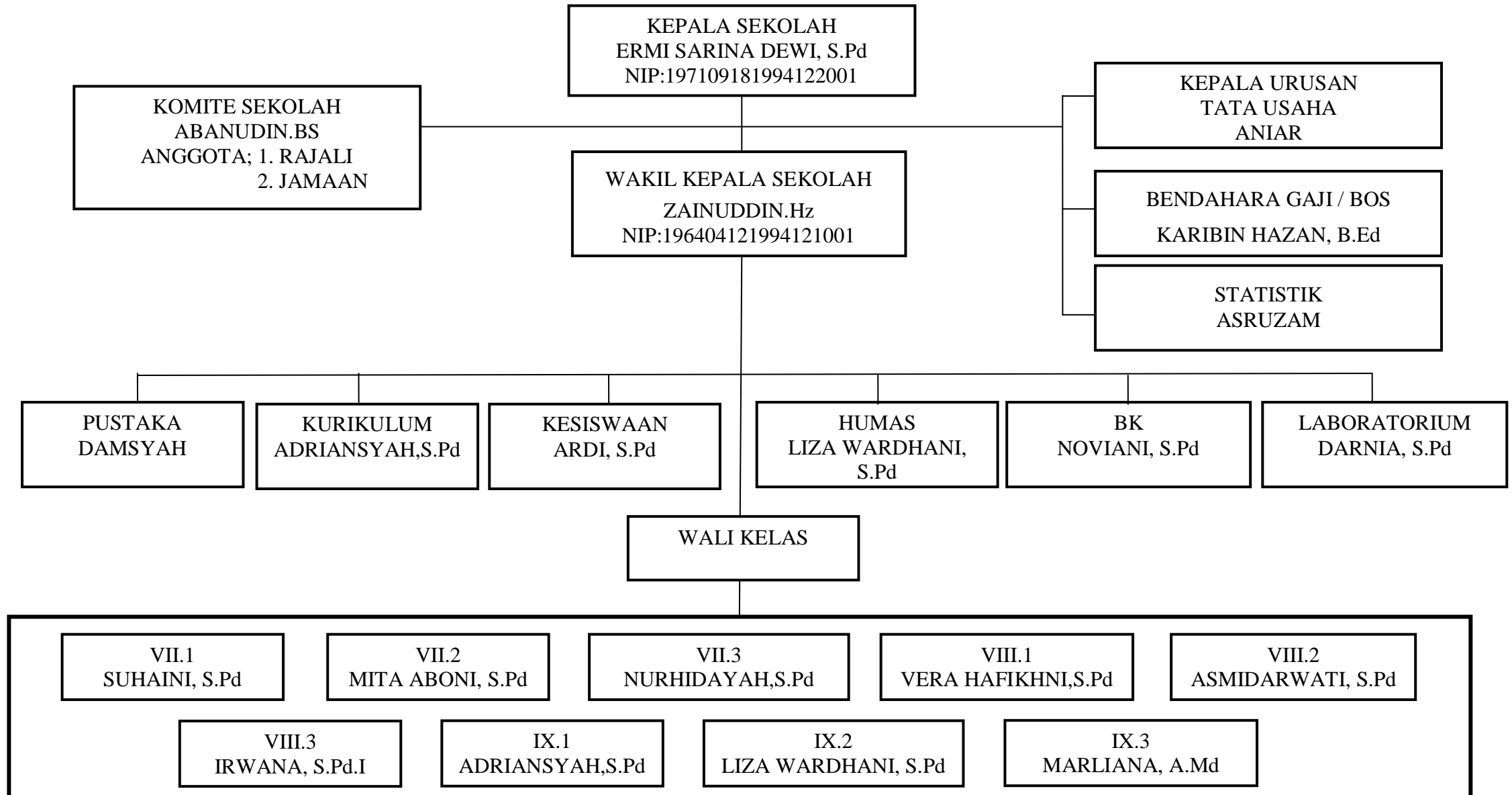
i. Laboratorium

j. Komite Sekolah

k. Wali Kelas; yang masing-masing membimbing 10 (sepuluh) Kelas.

Bagan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Sileulue Provinsi Aceh sebagaimana pada halaman berikut ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 3 SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE ACEH**



Sumber Data: Tata Usaha SMP Negeri 3 Simeulue Timur Tahun 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yaitu yang meliputi :

1. Deskripsi Data Narasumber

Narasumber sebagai Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 dan komite sekolah serta orang tua murid yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang Responden, yang kalau dirinci berdasarkan, pendidikan, kemudian berdasarkan usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1

**Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan Formal pada
SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	0	0%
2	S1	2	40%
3	SLTA/SMK	3	60%
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil penelitian tahun 2018

Tabel 4.2

**Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan Non Formal pada
SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**

No	Diklat	Jumlah	Persentase
1	Diklat Pim IV	2	40%
2	Diklat Teknis	3	60%
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil penelitian tahun 2018

Tabel 4.3

**Distribusi Narasumber berdasarkan Usia/Umur pada
SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**

No	Usia / Umur	Jumlah	Persentase
1	31-40 tahun	1	20 %
2	41-50 tahun	4	80 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil penelitian tahun 2018

Tabel 4.4

**Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin pada
SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil penelitian tahun 2018

2. Deskripsi Data Hasil Wawancara

Data Hasil wawancara dengan Narasumber dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh adalah sebagai berikut;

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ermi Sarina Dewi, S.Pd sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 mengenai pertanyaan tentang bagaimana mengimplementasi Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya, dalam mengimplementasi Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS agar dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). bahwa kami sebagai pimpinan pada SMP Negeri 3 ini sering mengadakan pengarahan kepada Staff dan Guru tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang penggunaan dana BOS.

Kemudian selain itu pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui Tim Fasilitator senantiasa mengadakan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Ibu Aniar selaku Kepala Urusan Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, menjelaskan mengenai pertanyaan tentang Sasaran apa saja yang dapat sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bahwa Sasaran yang dapat sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan program sekolah terutama dalam kegiatan pembelajaran dan dan fasilitas alat-alat kebutuhan belajar siswa.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin HZ, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 yang menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana cara memberikan pemahaman kepada para pegawai pengelola anggaran agar dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beliau menjelaskan bahwa cara memberikan pemahaman kepada para pegawai pengelola anggaran agar dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu melalui rapat staff dengan para pengelola sekolah dan pengelola anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

b. Adanya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ermi Sarina Dewi, S.Pd. sebagai

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 09.15 wib, mengenai pertanyaan wawancara tentang bagaimana tata cara (prosedur) yang harus dilalui untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). beliau mengatakan bahwa kami semua pimpinan dan staf administrasi dan para pelaksana tugas dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah sangat memahami harus bagaimana tata cara (prosedur) yang harus dilalui untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); karena kebijakan itu merupakan pedoman kerja kami di SMP, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pelayanan administrasi sekolah, sehingga kami yakin bahwa kebijakan Mendiknas sudah dapat memenuhi harapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kemudian mengenai pertanyaan tentang apakah pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan; ; Ibu Ermi Sarina Dewi, S.Pd. mengatakan bahwa memang semua pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;

Selanjutnya mengenai pertanyaan tentang bagaimana caranya agar sekolah memahami tata cara (prosedur) dalam mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beliau mengatakan bahwa memang sudah ada

pedoman teknis dari pihak Dinas Pendidikan tentang cara agar sekolah memahami tata cara (prosedur) dalam mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Adanya anggaran yang dibutuhkan untuk biaya Operasional Sekolah dalam menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Deski sebagai Pengawas Sekolah SMP Negeri 3 Simeulue Timur pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 09.15 wib, mengenai pertanyaan wawancara tentang apakah ada anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM), beliau mengatakan bahwa kami semua segenap pimpinan dan staf ada anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM).sebagai wujud dari pelaksanaan kebijakan Permendiknas. Kemudian mengenai pertanyaan tentang apakah apakah anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) sudah memenuhi harapan sekolah, beliau mengatakan bahwa memang ada anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) sudah memenuhi harapan sekolah.

Kemudian Bapak Muhammad Deski sebagai Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur juga menjelaskan mengenai pertanyaan tentang bagaimana caranya pihak sekolah dalam memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam

menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) beliau mengatakan bahwa caranya pihak sekolah dalam memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM)yaitu dengan cara pihak sekolah membuat perencanaan pembelajaran (proposal) yang diajukan kepada pihak pemerintah.

d. Adanya strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari hasil wawancara dengan Zainuddin HZ, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 09.30 wib, mengenai pertanyaan wawancara tentang apakah ada strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beliau mengatakan bahwa memang ada strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu dengan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Sekolah;

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Zainuddin HZ, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur dalam kaitannya dengan pertanyaan tentang strategi yang bagaimana yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). beliau mengatakan bahwa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana (BOS) adalah dengan mengembangkan proses belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Bapak Asruzam sebagai Ketua Komite Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur

mengenai pertanyaan tentang apakah strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memenuhi harapan pihak Sekolah, beliau mengatakan bahwa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memenuhi harapan pihak Sekolah. karena kami merasakan adanya perubahan dalam memfasitasi kebutuhan belajar anak-anak didik di sekolah kami.

B. Pembahasan

Berdasarkan data hasil wawancara dengan para nara sumber di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh sebagaimana yang penulis sajikan dalam uraian terdahulu maka dalam pembahasan ini akan dianalisis yaitu sebagai berikut;

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dari hasil wawancara dengan para narasumber mengenai adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama tentang bagaimana mengimplementasi Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana responden menjelaskan bahwa pada dasarnya, dalam mengimplementasi Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). bahwa para pimpinan pada SMP Negeri 3 ini sering mengadakan pengarahan kepada Staff dan Guru tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang penggunaan dana BOS. Kemudian selain itu pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui Tim Fasilitatornya senantiasa mengadakan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah. Selanjutnya dari hasil wawancara tentang sasaran apa saja yang dapat sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).dimana dijelaskan bahwa sasaran yang dapat sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan program sekolah terutama dalam kegiatan pembelajaran dan dan fasilitas alat-alat kebutuhan belajar siswa.Kemudian mengenai bagaimana cara memberikan pemahaman kepada para pegawai pengelola anggaran agar dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) responden menjelaskan bahwa cara memberikan pemahaman kepada para pegawai pengelola anggaran agar dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).yaitu melalui rapat staff dengan para pengelola sekolah dan pengelola anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dimana secara konsepsi implementasinya sangat didukung

adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut yang merupakan sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.

Jadi pada dasarnya pimpinan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sering mengadakan pengarahan kepada bawahannya tentang tujuan dan sasaran

pelaksanaan Peraturan Mendiknas tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Mendiknas Tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan perwujudan dalam menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari suatu kegiatan.

2. Adanya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dari hasil wawancara dengan para Narasumber tentang adanya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama mengenai bagaimana tata cara (prosedur) yang harus dilalui untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana dikatakan bahwa semua pimpinan dan staf administrasi sekolah dan para pelaksana tugas serta guru dilingkungan SMP sudah sangat memahami harus bagaimana tata cara (prosedur) yang harus dilalui untuk mendapatkan Dana BOS; karena kebijakan itu merupakan pedoman kerja kami di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pelayanan administrasi sekolah, sehingga kami yakin bahwa kebijakan Mendiknas sudah dapat memenuhi harapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS.

Kemudian mengenai pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memiliki wewenang dan

tanggung jawab yang telah ditetapkan dimana dijelaskan bahwa pada saranya semua pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Selanjutnya mengenai bagaimana caranya agar sekolah memahami tata cara (prosedur) dalam mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dikatakannya bahwa memang sudah ada pedoman teknis dari pihak Dinas Pendidikan tentang cara agar sekolah memahami tata cara (prosedur) dalam mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana implementasi kebijakan tersebut secara konsepsi merupakan suatu keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; dan aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana, sehingga implementasi kebijakan Permendiknas merupakan proses untuk menjamin terselenggaranya secara tertib pemberian pelayanan administrasi pendidikan terutama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tentunya dalam proses dan prosedur implementasi kebijakan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti antara lain komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya, sehingga dalam

kaitannya dengan proses dan prosedur pelaksanaan kebijakan Permendiknas hal ini sangat diperlukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses dan prosedur pelaksanaan kebijakan Permendiknas dalam memberikan pendidikan sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan yang merupakan proses untuk mentaati segala aturan kerja yang telah ditentukan, yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya.

3. Adanya anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM).

Dari hasil wawancara dengan para Narasumber mengenai Adanya anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM), terutama tentang adanya anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM), dimana dikatakan bahwa semua dan segenap pimpinan dan staf ada anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM).sebagai wujud dari pelaksanaan kebijakan Permendiknas. Kemudian mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) sudah memenuhi harapan sekolah, dimana dikatakan bahwa memang ada anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) sudah memenuhi harapan sekolah. Kemudian

juga dijelaskan mengenai caranya pihak sekolah dalam memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) dimana dikatakan caranya bahwa pihak sekolah dalam memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) yaitu dengan cara pihak sekolah membuat perencanaan pembelajaran (proposal) yang diajukan kepada pihak pemerintah.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM). dimana implementasi kebijakan tersebut secara konseptual merupakan suatu keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; dan aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana, sehingga implementasi kebijakan Permendiknas merupakan proses untuk menjamin terselenggaranya secara tertib proses pemberian pelayanan bidang pendidikan, dan tentunya dalam proses implementasi kebijakan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti antara lain komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya, sehingga dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Permendiknas merupakan suatu hal yang sangat diperlukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pelaksanaan kebijakan Permendiknas sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan Permendiknas, karena kebijakan tersebut mengatur tentang prosedur dalam pengelolaan BOS yang telah ditentukan, yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya.

4. Adanya strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari hasil wawancara dengan para narasumber mengenai adanya strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama tentang ada strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana dikatakan bahwa telah ada strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu dengan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Sekolah. Selanjutnya tentang strategi yang bagaimana yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). dijelaskan bahwa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dengan mengembangkan proses belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan mengenai strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dijelaskan bahwa sudah memenuhi harapan pihak Sekolah, yang mengatakan bahwa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memenuhi

harapan pihak Sekolah. karena kami merasakan adanya perubahan dalam memfasitasi kebutuhan belajar anak-anak didik di sekolah kami.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). bahwa telah ada strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu dengan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Sekolah, dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dengan mengembangkan proses belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta sudah memenuhi harapan pihak Sekolah, dimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana (BOS) sudah memenuhi harapan pihak Sekolah. karena kami merasakan adanya perubahan dalam memfasitasi kebutuhan belajar anak-anak didik di sekolah kami.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah ada strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu dengan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Sekolah. Kemudian strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dengan mengembangkan proses belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta sudah memenuhi harapan pihak Sekolah, karena strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana (BOS) sudah memenuhi harapan pihak Sekolah; dan sudah dapat merasakan

adanya perubahan dalam memfasitasi kebutuhan belajar anak-anak didik di sekolah kami.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut yang merupakan sistem penyampaian/ penerusan kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/ didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.
2. Dalam proses dan prosedur pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 dalam memberikan pendidikan sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan yang merupakan proses untuk mentaati segala aturan kerja yang telah ditentukan, yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya.

3. Dalam prosedur pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan, karena kebijak Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengatur tentang prosedur dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditentukan, yang walaupun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya.
4. Strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). telah ada strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu dengan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Sekolah. Kemudian strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dengan mengembangkan proses belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta sudah memenuhi harapan pihak Sekolah, karena strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memenuhi harapan pihak Sekolah; an sudah dapat merasakan adanya perubahan dalam memfasitasi kebutuhan belajar anak-anak didik di sekolah kami.

B. Saran-Saran

1. Bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 perlu menentukan tujuan dan sasaran dalam mengimplementasi kebijakan tersebut, mengingat kebijakan tersebut merupakan proses untuk mentaati segala aturan kerja yang telah ditentukan dalam pelaksanaan tugas para pegawai.
2. Dalam proses dan prosedur pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 terutama dalam memberikan pendidikan perlu ditentukan oleh implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut yang merupakan proses untuk mentaati segala aturan kerja yang telah ditentukan, yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya.
3. Bahwa dalam prosedur pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, perlu ditentukan oleh implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena kebijakan tersebut mengatur tentang prosedur dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditentukan, yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa

faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya.

4. Bahwa strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perlu adanya strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu dengan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Sekolah. Kemudian strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dengan mengembangkan proses belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta sudah memenuhi harapan pihak Sekolah, karena strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah memenuhi harapan pihak Sekolah; dan sudah dapat merasakan adanya perubahan dalam memfasitasi kebutuhan belajar anak-anak didik di sekolah kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2006, *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo 20011, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu Yogyakarta
- Budiman, Nashir, 2013, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2004, *Implentasi Kebijakan*. Yogyakarta
- Dunn, William N 2013, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Inu Kencana, Syafi'i, 2006, *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2009, *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Lubis, Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Moloeng, J, Lexy, 2006, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Renika Cipta, Jakarta.
- Moenir, H. A. S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mustopadidjaya, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja*, LAN. Jakarta.
- Notoatmoja, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, PT Renika Cipta, Jakarta
- Tachjan H 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Lemlit UNPAD
- Tangkilisan, Hessel, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta
- Thomas, R. Dye 2007, *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Rosdakarya. Bandung
- Soeharno, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, UYI, Yogyakarta.
- Susilo, Muhammad Joko, 2007, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Winarno, Budi. 2005 : *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Media

Tabel 4.1

**Distribusi Nara sumber berdasarkan Pendidikan Formal dan NonFormal
(Diklat) pada SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Aceh**

No	Nama Narasumber	Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal (Diklat)	Jumlah	%
1	Ermi Sarina Dewi, S.Pd	S1	Diklat Pim IV	1	20 %
2.	Zainuddin Hz	S1	Diklat Pim IV	1	20 %
3	Aniar	SMK	-	1	20 %
4	Asruzam	SMK	-	1	20 %
5	Muhammad Deski	SLTA	-	1	20 %
Jumlah				5	100%

Sumber : SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tahun 2018

Tabel 4.2

**Distribusi Nara sumber berdasarkan Usia/Umur dan Jenis Kelamin pada
SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**

No	Nama Narasumber	Usia/Umur	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Ermi Sarina Dewi, S.Pd	47 tahun	Perempuan	1	20 %
2	Zainuddin Hz, S.Pd	46 tahun	Laki-laki	1	20 %
3	Aniar	42 tahun	Perempuan	1	20 %
4	Muhammad Deski	46 tahun	Laki-laki	1	20 %
5	Asruzam	36 tahun	Laki-laki	1	20 %
Jumlah				5	100%

Sumber : SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tahun 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISK A YULIANTI
NPM : 1303100175
Tempat/Tgl.Lahir : Busung, 03 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tgk Diujung Simpang Lanting
Anak ke : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. M. Junir
Ibu : Haridam
Alamat : Jl. Tgk Diujung Simpang Lanting

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SDN 2 Simeulue Timur
 2. Tamatan SMPN 3 Simeulue Timur
 3. Tamatan SMAN 2 Simeulue Timur
 4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

RISKA YULIANTI

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK EFISIENSI BIAYA
PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI SMP NEGERI 3 SIMEULUE
TIMUR KABUPATEN SIMEULUE

B. Pertanyaan wawancara

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- a. Bagaimana mengimplementasi Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS agar dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- b. Sasaran apa saja yang dapat sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- c. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada para pegawai pengelola anggaran agar dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Adanya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan dana Bantuan operasional sekolah (BOS).

- a. Bagaimana tata cara (prosedur) yang harus dilalui untuk mendapatkan Dana BOS;

- b. Apakah pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mendapatkan dana Bantuan operasional sekolah (BOS) sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
- c. Bagaimana caranya agar sekolah memahami tata cara (prosedur) dalam mendapatkan dana Bantuan operasional sekolah (BOS).

3. Adanya anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM).

- a. Apakah ada anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM).
- b. Apakah anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) sudah memenuhi harapan sekolah.
- c. Bagaimana caranya pihak sekolah dalam memenuhi anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM)

4. Adanya strategi dalam pelaksanaan penyaluran dana (BOS).

- a. Apakah ada strategi dalam melaksanakan penyaluran Dana BOS;
- b. Strategi yang bagaimana yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana (BOS).

- c. Apakah strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana (BOS) sudah memenuhi harapan pihak Sekolah.

.....o0o.....